

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON  
KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka)**

Fridus Bria<sup>1</sup>, Mariano Sengkoen<sup>2</sup>  
( [fritbria99@gamil.com](mailto:fritbria99@gamil.com) , [sengkoenmariano@yahoo.co.id](mailto:sengkoenmariano@yahoo.co.id) )

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

**Abstrak**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai dengan tingginya partisipasi partai politik dalam pemilihan umum. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara mandiri atau dalam koalisi memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, gubernur, legislatif maupun kepala daerah tingkat kabupaten. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi politik yang diterapkan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dalam merekrut kader Calon Kepala Daerah untuk bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC PDIP menerapkan sistem perekrutan anggota dan simpatisan partai secara terbuka. Selanjutnya, dalam hal pengusungan calon Kepala Daerah, DPC PDIP kabupaten malaka menerapkan sistim penyaringan piramida, di mana semua kader diseleksi untuk mendapatkan kader terbaik sebagai bakal calon kepala daerah. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, seorang kader harus mampu memiliki tingkat pendidikan minimal S1, pengetahuan dan pola pikir yang inovatif, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter pemimpin, memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik melalui garis keturunan maupun pencapaian lewat jenjang karier.

**Kata Kunci:** DPC PDIP Kabupaten Malaka, sistem rekrutmen politik, pengusungan Calon Kepala Daerah

**PENDAHULUAN\***

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai dengan tingginya partisipasi partai politik dalam pemilihan umum. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Sistem Multipartai ini bertujuan untuk menegakkan pemerintahan berdasarkan demokrasi. Untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, maka figur-figur politik yang menjadi representasi rakyat harus mampu menunjukkan kualitasnya dalam pemerintahan, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Partai politik sangat berperan untuk mewujudkan ikhtiar tersebut.

Partai politik merupakan suatu kelompok organisasi politik yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat

mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah (Moshe:1997). Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian diatas tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia.

Pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri, sebab juga terjadi di negara-negara di dunia yang menganut dan

menjalankan sistem demokrasi. Partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataan sekarang, figur-figur politik yang berhasil lolos pada pemilihan umum, mereka lebih hanya mementingkan kepentingan partai, kelompok dan golongan dibanding kepentingan umum. Salah satu faktor penyebabnya ialah pola rekrutment anggota partai yang lebih mengutamakan besaran massa yang dimiliki, dibanding tingkat pendidikan seseorang, pola kaderisasi, karakter, dan moral figur. Faktor penyebab tersebut di atas sering melahirkan figur politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok saja. Kondisi seperti ini diperparah oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik yang minim, maraknya praktik politik pragmatis, politik uang, dan lain sebagainya. Persoalan ini nantinya akan mendekatkan pada sistem pemerintahan yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan pemerintahan yang otoriter, juga memicu konflik horizontal karena perbedaan atau persaingan politik yang tidak sehat. Pernyataan-pernyataan ini bisa dilihat secara kasat mata pada kehidupan politik di Kabupaten Malaka saat ini.

Sebagai suatu daerah otonomi baru, Kabupaten Malaka harus memiliki pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin yang baik dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi setiap warga malaka pada umumnya sebagai fondasi pembangunan awal yang kuat. Kabupaten Malaka yang baru berumur 9 tahun ini ternyata menyimpan fenomena dinamika kehidupan politik yang buruk akibat persaingan politik. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 menjadi contoh konkrit ([regional.inews.id](http://regional.inews.id)). Selanjutnya, pemerintahan Kabupaten Malaka, yang pada periode lalu (2015-2020) telah melahirkan sistem pemerintahan yang tidak memiliki oposisi atau kekuatan pihak oposisi lemah, ternyata memberikan peluang yang luas bagi segelintir pihak untuk mengambil hak rakyat melalui program-program pemerintah.

Persoalan di atas menjadi ancaman serius bagi kemajuan daerah dan keutuhan kehidupan sosial di kabupaten. Untuk memperbaiki kondisi seperti itu maka kuncinya ada pada partai politik. Partai politik, sebagai sarana politik yang digunakan oleh figur politik dengan popularitas dan elektabilitas yang dimiliki untuk merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan kepala daerah, harus mampu mengontrol dan membina anggota figur yang diusungnya. Partai politik juga berperan untuk menciptakan kader pemimpin yang idealis, nasionalis, dan bertanggung jawab seutuhnya terhadap tugas yang diemban.

Partai politik perlu memenangkan kompetisi. Dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah, setiap partai politik memiliki strateginya masing-masing, termasuk PDIP. Sebagai partai politik yang bertarung dalam momentum pemilihan umum, PDIP menggunakan strategi Gotong Royong, pendidikan calon kepala daerah, strategi penggalangan dukungan, dan pendidikan komunikasi politik. Melalui strategi Gotong Royong ini seluruh kader dan simpatisan partai serta juru kampanye dari partai PDIP diberikan pendidikan atau pembekalan untuk Bergotong Royong memikul beban dan tanggung jawab bagi pemenangan calon kepala daerah yang diusung. Dengan penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap sistem kaderisasi partai politik untuk menjamin mutu dan kualitas figur politik mampu melakukan terobosan perubahan pembangunan di Kabupaten Malaka ke arah yang lebih baik dari berbagai sektor kehidupan yang ada.

Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, *Strategic Planning*, 1979, Free Press). Strategi politik merupakan suatu analisis tentang bagaimana proses yang terjadi dalam upaya untuk memenangkan suatu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang kandidat yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sementara itu, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai

sekolompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materiil. Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Giovanni Sartori mendefinisikannya sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Budiardjo, 2009, h. 403-405).

Dari definisi tersebut setidaknya ada beberapa hal dapat dijelaskan tentang Partai Politik. *Pertama*, sebagai organisasi maka partai politik merupakan entitas yang bekerja dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan dan adanya aturan organisasi yang mengikat anggotanya, memiliki program yang terencana, dan pengorganisasian sumber daya organisasi. *Kedua*, sebagai instrumen perjuangan nilai atau ideologi yang berfungsi sebagai pemberi corak khusus organisasi, menjadi pisau analisis bagi organisasi dalam memahami realitas, dan pada akhirnya berfungsi sebagai pemandu perilaku anggotanya. *Ketiga*, penguasaan struktur kekuasaan untuk mempertahankan sekaligus menjalankan nilai atau ideologi yang dianut partai tersebut, dengan mengikuti mekanisme yang berlaku seperti pemilihan umum.

Menurut Gabriel Almond rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Menurut Afan Gaffar, dalam negara demokratis, rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka, di mana setiap orang, yang mampu dan memenuhi syarat, mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses seleksi yang dilakukan dengan kriteria-kriteria oleh suatu organisasi politik tertentu terhadap anggota masyarakat untuk menjadi pemimpin politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi politik yang diterapkan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dalam merekrut kader Calon Kepala Daerah untuk bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah pada strategi yang digunakan oleh PDIP Malaka dalam rekrutmen Calon Kepala Daerah (Calon Bupati dan Wakil Bupati), pendidikan kaderisasi, pengembangan kader, dan popularitas serta elektabilitas PDIP di Kabupaten Malaka. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Untuk Mendalami Fokus Tersebut Penelitian ini akan menggunakan aspek-aspek seperti Sekretariat Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malaka yang melaksanakan fungsi perekrutan, pendidikan kader, dan pengembangan kader dalam internal partai. Penjabaran strategi DPC PDIP dalam perekrutan kaderisasi di Kabupaten Malaka yang akan diteliti berkaitan dengan *pertama*, Kriteria Calon Kader Anggota Partai, *kedua*, Tingkat Kemampuan Kader, *ketiga*, Proses Pengusungan Calon Kepala Daerah, *keempat*, Tingkat Kecerdasan Seorang Figur, dan *kelima*, Tingkat Elektabilitas Yang Dimiliki Oleh Seorang Kader.

Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan para informan, yang didukung dengan studi dokumentasi dan pustaka. Informan penelitian dilihat dari kapasitas dan posisi strategis pada struktur kepemimpinan di sekretariat DPC PDIP, yakni para pejabat struktural pada DPC PDIP Kabupaten Malaka. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan PDIP pusat dalam bentuk keputusan-keputusan, ataupun dokumen-dokumen pelengkap, seperti SOP (Sistem Operasi Prosedural) dan buku-buku petunjuk teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan perekrutan, pendidikan, dan pengembangan kader partai. Data-data penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif untuk merumuskan hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Calon Anggota Partai**

Partai politik sangat berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam negara dengan sistem demokrasi. Melalui seleksi pemilihan umum di mana setiap partai politik bertarung untuk mampu mendapatkan kekuasaan dalam tubuh pemerintahan dengan skema pemilihan umum (pilkada, pilgub, dan pemilihan umum). Tentunya hal ini bukanlah hal yang gampang bagi partai politik untuk memenangkan kompetisi. Partai politik dapat memobilisasi segala kemampuan baik secara internal partai maupun eksternal (simpatisan) untuk menguatkan posisinya dalam pertarungan tersebut. Oleh karena itu, PDIP melalui DPC di Kabupaten Malaka melakukan rekrutment politik bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota partai maupun simpatisan partai dengan tujuan memperkuat pengaruhnya bagi masyarakat.

Melalui hasil wawancara terkait kriteria kriteria khusus yang ditetapkan DPC PDIP Kabupaten Malaka, dalam rekrutment calon anggota partai maupun simpatisan partai, diketahui bahwa tidak ada kriteria khusus yang digunakan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dalam merekrut calon anggota atau simpatisan partai. Dengan demikian, DPC PDIP Kabupaten Malaka menerapkan sistem rekrutmen terbuka. Artinya bahwa siapa saja yang tertarik dan ingin menjadi anggota partai diberikan kebebasan mutlak untuk mendaftarkan diri sebagai anggota tetap partai maupun sebatas simpatisan.

Di lain sisi dapat dipahami bahwa kepentingan rekrutment ini utamanya untuk mendapatkan besaran kekuatan politik dari DPC PDIP Kabupaten Malaka dan juga menjalankan salah satu fungsi partai yaitu Rekrutment Politik. Fungsi ini merupakan wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu dengan tidak menerapkan kriteria khusus bagi calon anggota partai.

Partai politik melalui fungsinya ini membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang politik. Partai politik ini senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangan dan persaingan perpolitikan yang ada. Hal ini dapat dilakukan karena PDIP mampu merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kepada kader-kader muda tersebut.

### **Tingkat Kemampuan Kader**

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia yang menganut sistem multi partai ini, kaderisasi parpol menjadi dasar dalam menentukan individu untuk menjadi calon politisi, pengurus parpol, atau calon pejabat publik. Rekrutmen dan kaderisasi parpol pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol sekaligus mencetak calon-calon individu, baik untuk anggota, pengurus parpol, jabatan publik maupun pemerintahan yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan kader, DPC PDIP Kabupaten Malaka melakukan penelusuran rekam jejak oleh tim penyeleksi dari partai kepada masyarakat lingkungan kader, memberikan pendidikan politik baik dalam hal menjadi pembicara ataupun tentang seni berpolitik, melatih untuk mengelola massa dengan melibatkan kader dalam setiap kampanye politik, dan menempatkan kader-kader tersebut kedalam jabatan struktural dalam partai sesuai dengan basis ilmu yang dikuasainya. Hal ini dilakukan agar kader kader tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Hasil penelitian ini jelas menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Malaka serius dalam menciptakan kader-kader terbaik agar dapat diikutsertakan dalam kontestasi dalam pemilu, baik pemilihan Kepada Daerah maupun pemilihan legislative daerah. Partai yang memiliki kader dengan kemampuan dan potensi sumber daya manusia yang baik akan mampu menguarakan segala jenis persoalan sosial dan melahirkan ide dan gagasan bagi masyarakat kelak telah menjadi pejabat publik dalam pemerintahan.

### **Proses Pengusungan Calon Kepala Daerah**

Proses pengusungan calon kepala daerah di tingkat DPC PDIP Kabupaten Malaka diutamakan dari kader internal partai, seperti ketua DPC atau kader lainnya dalam lingkup internal partai. Namun jika dari tingkat internal DPC partai tidak ada kader yang dianggap cukup berpotensi untuk memenangkan hajatan politik elektoral, maka akan dilakukan penjarangan secara terbuka dengan memperhatikan syarat-syarat pengusungan calon kepala daerah.

Rekrutmen politik untuk bakal calon kepala daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon yang memiliki kompetensi untuk memimpin dan menciptakan perubahan bagi Kabupaten Malaka ke arah yang lebih baik

selama minimal lima tahun yang akan datang.

Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan nama bakal calon terbaik dari ketersediaan bakal calon yang ada atau telah mengajukan lamaran. Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon kepala daerah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP melaksanakan rapat dengan seluruh pengurus struktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilih satu (1) nama kandidat yang akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Melalui beberapa pertimbangan dan masukan dari pengurus partai di daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menetapkan satu nama calon yang akan di usung dalam pemilukda.

Tahapan-tahapan ini menggunakan sistem piramida atau mengkerucut, untuk bisa mendapatkan kader terbaik calon kepala daerah yang dimiliki. Dengan kemampuan melahirkan kader calon kepala daerah yang terbaik tersebut akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi partai di mata masyarakat.

#### **Tingkat Kecerdasan Calon Kepala Daerah**

Dalam seleksi pengusungan calon kepala daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka selalu mempertimbangkan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh calon yang diusung tersebut. Kader calon kepala daerah yang telah diusung diharapkan akan mampu memberikan perubahan yang baik bagi proses pembangunan di Kabupaten Malaka.

Kecerdasan yang harus dimiliki ini antara lain memiliki kompetisi dalam membaca arah pergerakan kelompok oposisi, mampu mengkoordinir setiap instansi dan pejabat dalam tubuh pemerintahan agar bisa bersinergi membangun Kabupaten Malaka secara bersama sama, memiliki insting yang baik dalam membaca perubahan sosial dan ekonomi pada masa mendatang, serta mampu menjaga nama baik partai ketika kader calon kepala daerah tersebut telah menjabat sebagai pejabat publik dalam tubuh pemerintahan.

Pemimpin pejabat publik dalam pemerintahan yang telah mampu memimpin suatu wilayah dengan baik akan memberikan dampak positif juga bagi masa depan kepemimpinan selama 5 tahun mendatang. Tingkat kecerdasan seorang kader calon kepala daerah ini juga dituntut untuk diimplementasikan dan diamalkan agar tidak terjerat kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat, partai, dan

popularitas personal kader calon kepala daerah yang bersangkutan.

#### **Tingkat Elektabilitas Dan Popularitas Calon Kepala Daerah**

Dalam masyarakat, sering dipahami bahwa orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konotasi ini ada benarnya, namun tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Bahkan, ada kalanya, antara popularitas dan elektabilitas justru saling bertolak belakang.

Kader Partai menjadi populer karena sering tampil di depan umum dan sering terlibat dengan persoalan-persoalan publik. Bagaimana kader tersebut tampil merupakan persoalan lanjutan untuk menilai elektabilitasnya. Kalau tampilnya sebagai pelaku kriminal, sebagai koruptor, atau karena tindakan yang melanggar etika publik, maka pengaruhnya terhadap elektabilitas tentu saja negatif.

Kader yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Namun untuk dapat dikenal secara luas, perlu ada usaha untuk memperkenalkan. Di sini publikasi dan kampanye memegang peranan penting. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak adanya promosi dan sosialisasi sehingga elektabilitasnya rendah. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Kondisi di atas tergantung pada dua aspek. Pertama, teknik kampanye yang dipergunakan. Kedua, tingkat kematangan masyarakat. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Sementara dalam masyarakat yang relatif maju, profesi calon menjadi cukup penting. Oleh karena itu, DPC PDIP Kabupaten Malaka selalu memperhatikan dual hal ini dalam mengusung calon kepala daerah. Elektabilitas dan popularitas dari kader calon kepala daerah yang diusung sangat diperhitungkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kerja partai dalam memenangkan simpati masyarakat pada saat pemilihan berlangsung.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi rekrutment Calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan perekrutan terbuka, bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota partai maupun simpatisan partai pdip tingkat dpc kabupaten malaka.

*Kedua*, untuk meningkatkan kemampuan kader, dilakukanlah penelusuran rekam jejak memberikan pendidikan politik, melatih kader untuk mengelola massa, serta menempatkan kader tersebut kedalam jabatan struktural dalam partai sesuai dengan basis ilmu yang dikuasai.

*Ketiga*, proses pengusungan calon kepala daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka diutamakan dari dewan pimpinan cabang, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk merekrut figur calon kepala daerah dari luar partai yang memenuhi kualifikasi partai, yang dilakukan dengan skema piramida atau mengerucut.

*Keempat*, DPC PDIP Kabupaten Malaka selalu mempertimbangkan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh calon yang diusung dalam hal kecerdasan berpikir, kecerdasan memecahkan persoalan, kecerdasan membaca arah dinamika politik dan sosial, dan kecerdasan melahirkan solusi bagi persoalan yang dihadapi.

*Kelima*, dalam pengusungan kader dalam pemilihan Calon Kepala Daerah, DPC PDIP Kabupaten Malaka juga mengutamakan tingkat popularitas dan elektabilitas dari calon kepala daerah yang diusung, agar memudahkan jalan untuk meraih kemenangan ataupun untuk mendapatkan koalisi dengan partai lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Budiardjo, Mariam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [2]. Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- [3]. George Steiner. 1979. *Strategic Planning*. Free Press.
- [4]. Haiman. H. & Hoelgert, R.L. 1989. *Supervision: Concept And Practice Management*. Ohio: South-Westher Publicing Co.
- [5]. Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [6]. Imam, Moejiono. 2002. *Kepemimpinan Dan Keorganisasian*. Yogyakarta: Pt Grafindo Persada Jakarta
- [7]. Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- [8]. Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- [9]. Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Isntitut Democracy And Welfarim
- [10]. Hungtinton, Samuel P. 1996. *The Class Of Civilizationand Remaking Of World Order*, (Eds.Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- [11]. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- [12]. Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [13]. Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.